

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang kuat bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan mencapai kebaikan bersama. Untuk itu demokrasi berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga dalam perkembangannya, ada yang menggantikan istilah demokratis dengan partisipatori untuk menekankan peranan warga negara dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu bentuk demokrasi politik yang didasarkan pada partisipasi adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat sehingga tercipta suatu pemerintahan yang demokratis, kuat, dan selalu memperoleh dukungan dari rakyat. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang diinginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Kelompok-kelompok pemilih potensial dan interaksi jaringan antar mereka harus dikelola optimal untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya, hal ini lah yang pada akhirnya membuat komunitas-komunitas kelompok marginal sering kali dijadikan sebagai komoditas politik untuk memperoleh simpati rakyat guna meraih

tujuan kekuasaan yang diinginkan pada setiap pagelaran pemilu. Ketika menghadapi pemilih yang heterogen, kandidat peserta pemilu dituntut memberikan tawaran politik yang dapat menyakinkan pemilih untuk memilih dirinya. Tidak heran jika banyak peserta pemilu, baik caleg maupun partai politik, yang beramai-ramai mengusung isu tentang “*pengejewantahan rakyat jelata*”.

Pemilu secara langsung telah mendekatkan antara kandidat dengan masyarakat. Pada saat menjelang pemilu banyak caleg maupun juru kampanye yang turun langsung menemui calon konstituennya yang mana kebanyakan dari mereka merupakan kaum marginal. Termasuk dari kalangan informal seperti pedagang kaki lima, tukang becak dan lain sebagainya. Alasan utama ditetapkannya pemilihan langsung oleh warga negara terhadap wakil rakyat adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestasi moral, intelektual dan pengabdianya pada masyarakat selama ini. Mengingat umumnya masyarakat kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon-calon wakil rakyat, apakah mereka tokoh-tokoh bermoral dan memiliki kompetensi atau tidak. Meski sistem pemilu sudah lebih maju namun yang akan mengendalikan dan mempengaruhi masih tetap para elite politik dan tokoh-tokoh agama dengan cara mobilisasi massa dan mungkin manipulasi dengan menggunakan kekuatan uang, sentiment etnis dan agama. Artinya proses pemilu mungkin sekali tidak akan berlangsung secara rasional tetapi ideologis emosional yang sarat nuansa sentiment kelompok.

Pengetahuan dan pendidikan pada dasarnya mempunyai peran penting dalam proses politik bagi pemilih. Melalui sosialisasi tersebut orientasi dan sikap politik terbentuk kemudian dari sikap yang terbentuk itu akan menjadikan munculnya afiliasi politik pemilih terhadap kandidat atau partai tertentu. Afiliasi politik secara spesifik memberikan perhatian pada dukungan dan sikap politik yang berkenaan dengan proses internal individu dalam rangka menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu dalam pemilihan legislatif 2014.

Sejak dahulu hingga saat ini, perempuan selalu berada pada posisi yang lemah. Kedudukannya tidak lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Penempatan-penempatan posisi perempuan selalu dibawah laki-laki dan berada di lingkungan privat. Sampai sekarang pun pandangan seperti itu seakan tidak akan pernah hilang. Perempuan dianggap tidak akan mampu memiliki hak yang lebih dibandingkan laki-laki. Kebutuhan perempuan pun terbatas di dalam ranah privat, termasuk didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan baik dalam bidang sosial, politik ekonomi dan lainnya.

Selama ini hal-hal yang berhubungan dengan politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Tindakan-tindakan seperti kemandirian, kebebasan berpendapat dan tindakan agresif dianggap tidak sesuai dengan diri perempuan. Apalagi dunia politik diidentikan dengan dunia kepemimpinan, dimana perempuan yang menjadi pemimpin selalu menghadapi berbagai macam hambatan.

Hal ini memunculkan adanya tanggapan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah dilalui dengan berbagai pengorbanan tidak diikuti dengan adanya kemerdekaan terhadap kaum perempuan.

Kaum perempuan sendiri masih memiliki kesadaran yang minim akan kehidupan sosial disekitarnya. Berbagai tanggapan muncul dan berkembang bahwa perempuan tidak sesuai dengan dunia politik yang terdominasi oleh laki-laki.

Kaum marginal kerap menyimpan sekian persoalan dilematis dalam kehidupan. Dalam praktiknya, diskriminasi pun muncul bersamaan dengan persoalan-persoalan yang timbul. Sementara kaum perempuan menjadi bagian dari kelompok marginal tersebut. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ranah publik dan tidak mampu menyuarakan kondisinya sebagai akibat kuatnya hegemoni dominan yang tidak berada jauh dari pandangan kita.

Mereka dimarginalkan oleh kondisi struktural yang membuat mereka tak mampu menemukan kerja dan sedikit harapan untuk meningkatkan gaya hidup mereka, sehingga mereka menjadi terpinggirkan.

Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. Proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan, hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh

perempuan saat proses marginalisasi ini pada jenis kelamin, perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Marginalisasi terhadap perempuan ini terjadi karena adanya perbedaan gender, penyifatan untuk laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan adanya satu pihak yang terpinggirkan. Sistem patriarki yang masih membudaya di masyarakat menyebabkan perempuan terus yang dijadikan manusia kedua setelah laki-laki. Haknya secara umum dikebiri dan keberadaanya terpinggirkan,

Kondisi struktural dari marginalisasi multisisi di wilayah perkotaan Indonesia : (1) karakter kebijakan kota, yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dan investasi, (2) sedikitnya akses kelompok-kelompok sosial tertentu terhadap proses pengambilan keputusan dan (3) kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kota. Nasib kelompok-kelompok marginal juga dipengaruhi oleh sikap pejabat pemerintah. Sikap pemerintah terhadap kaum marginal karena ketidaksukaan karena yakin keberadaan mereka illegal hingga menoleransi keberadaan mereka sepanjang tidak menentang peraturan secara terbuka. Kaum perempuan diberi kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap saja diikat dengan norma patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi yang dilematis terhadap posisi mereka. Kaum perempuan dibolehkan bekerja dengan catatan hanya sebagai penambah pencari nafkah keluarga belum lagi kewajiban utama mengasuh anak dibebankan sepenuhnya kepada perempuan.

Secara kenyataan saja emansipasi masih menemukan persoalan tersendiri, yang sangat mengharapkan kesetaraan hubungan yang serasi dan harmonis antara kaum perempuan dengan kaum pria.

Suara perempuan dan kaum marginal, masih rentan dimanipulasi. Mereka selalu menjadi korban dengan apa yang disebut sebagai *money politic*, juga rentan terhadap mobilisasi dan cenderung hanya menjadi pemilih tradisional. Lapisan ini selalu menjadi sasaran bagi-bagi uang atau sembako, jelang pemilu maupun pilukada. Dimana kondisi ekonomi yang sulit dan pemahaman yang kurang membuat kaum marginal terdorong memberikan hak pilih demi selebar 50 ribu rupiah atau iming-iming lainnya, dan karena keterbatasan pengetahuan membuat kaum marginal mudah dimobilisasi dan dipecah diantara mereka.

Perempuan marginal sebagai kelompok kepentingan sektor informal juga memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif 2014 di Surabaya pada tanggal 9 April 2014. Mereka sering digunakan sebagai objek kampanye oleh para kandidat. Disadari maupun tidak, mereka ikut terlibat dalam arus kekuasaan politik dengan secara langsung dan atau tidak langsung memberikan dukungan pada kontestan dan atau partai politik tertentu. Meskipun demikian, kekuatan atau pengaruh mereka di dalam bidang tersebut masih kurang kuat dibandingkan dengan partai politik dan pengusaha besar (pemilik modal). Hal inilah yang membuat penulis tertarik dengan topik ini. Yang

bermaksud mendeskripsikan mengenai afiliasi politik perempuan marginal dalam pemilihan legislatif 2014 di Surabaya.

Pertanyaan yang menarik disini adalah apakah dalam menentukan pilihan politiknya, pemilih lebih berorientasi pada partai politik tempat seorang calon berafiliasi, atau pada ketokohan calon yang dijagokan baik kemampuan, pengalaman maupun kepribadian dan wataknya tanpa terlalu peduli dari mana calon tersebut berasal ? secara logis dapat diperkirakan dua kemungkinan orientasi pemilih terhadap partai politik yaitu : ¹

- ✓ Pemilih akan lebih tertarik pada partai-partai politik yang besar dan sudah mapan dalam pengalaman politiknya dan bersikap was-was terhadap partai-partai politik baru yang belum diketahui kemampuan dan orientasi politiknya.
- ✓ Banyak orang mulai bosan dengan kehadiran partai-partai besar yang tidak membawa banyak perubahan politik dan perbaikan social dan kemudian member perhatian kepada partai-partai baru, karena mengharapkan bahwa kehadiran partai-partai baru tersebut akan membawa perubahan politik ke arah yang diinginkan.

Atau bahkan jika kedua kemungkinan di atas masih menimbulkan kebingungan bagi pemilih, besar kemungkinan orang tidak bergairah memilih dan mulai berpikir untuk bergabung dengan golput (golongan putih). Seseorang memilih menjadi

¹ Syamsudin Haris *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai (Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal xii.

golput karena terdapat dua kemungkinan, pertama *opsi negatif* ketika pemilih merasa tidak mempunyai cukup alasan untuk memilih. Dan kedua *opsi positif* ketika pemilih memiliki cukup alasan untuk tidak turut memilih.

Perempuan marginal sebagai kelompok kepentingan sektor informal juga memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pileg pada tanggal 9 April 2014 di Surabaya. Mereka sering digunakan sebagai objek kampanye oleh para kandidat. Disadari maupun tidak mereka ikut terlibat dalam arus kekuasaan politik dengan secara langsung dan tidak langsung memberikan dukungan pada konstantan atau partai politik tertentu. Meskipun demikian, kekuatan atau pengaruh mereka di dalam bidang tersebut masih kurang kuat dibandingkan dengan partai politik dan pengusaha besar (pemilik modal). Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik dengan topik ini, sehingga hal tersebut layak untuk diteliti. Mendeskripsikan mengenai afiliasi politik perempuan marginal khususnya buruh sektor informal dan memberikan gambaran mengenai afiliasi politik mereka dalam pileg Surabaya 2014.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dicoba merumuskan permasalahan yang akan dikemukakan dalam kajian analisa ini, sebagai berikut :

1. Mengapa arah afiliasi politik perempuan marginal mengarah pada partai PKS dan PPP di Makam Rangkah pada pemilu legislatif tahun 2014 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi afiliasi politik perempuan marginal pada pemilu legislatif 2014 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui arah afiliasi politik perempuan marginal di kawasan Makam Rangkah pada pemilu legislatif 2014 di Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi arah afiliasi politik perempuan marginal di Makam Rangkah pada pemilu legislatif 2014 di Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara luas mengenai pola perilaku memilih pada perempuan marginal dalam pemilu legislatif 2014 di Surabaya.
- Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru bagi peneliti dan secara akademis mampu menambah wacana pengetahuan sehingga meningkatkan pengembangan keilmuan khususnya dalam studi ilmu politik.

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku politik memilih.
- . Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi afiliasi politik perempuan marginal serta alasan arah afiliasi politik perempuan marginal dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Surabaya.

I.5 Kerangka Teoritik

Penelitian ini menekankan pada penggunaan teori rational choice dalam menganalisa perilaku memilih, disamping itu digunakan beberapa pendekatan perilaku memilih, budaya politik dan identifikasi partai.

I.5.1 Teori Rational Choice

Dalam teori rational choice, dikemukakan bagaimana orang memilih partai atau calon. Individu yang akan membuat keputusan aktif mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan-pilihan yang ada, bisa berupa parpol maupun calon yang ada dalam partai politik. Pemilih akan melihat calon atau partai mana yang menguntungkan dirinya. Motivasi pemilih dalam memilih adalah kepentingan pribadi, berbeda dengan orang yang sudah tersosialisasi sejak awal dengan ukuran *party identification*. Dalam perspektif rational choice Anthony Downs menyatakan bahwa identifikasi dan ekspresi partisipanship dianggap

sebagai motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.² Downs menganggap bahwa memilih merupakan sesuatu yang sifatnya instrumental, orang memilih ketika ada keperluan penting dibalik perilaku memilihnya tersebut.³

Memilih merupakan suatu tipe reputasi dimana individu membawa kepentingan, dimana dia berkepentingan juga dalam aktivitas kesehariannya. Kalkulasi rasional menunjukkan tingkat otonomi responden dalam memilih partai politik melalui daya nalar dan telaah kritis serta proses evaluasi pemilih terhadap pilihannya, memahami perilaku memilih melalui pendekatan rasional adalah pilihan politik seseorang baik pada partai atau calon yang sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengevaluasi kinerja partai yang sedang berkuasa. Media kampanye juga mempengaruhi kalkulasi pemilih yang lebih menaruh pada aspek psikologis, kampanye ialah upaya memperoleh dukungan pemilu dalam jangka waktu tertentu.

I.5.2 Faktor Sosiologis, Psikologis, Rasional dan Emosional

I.5.2.1 Faktor Sosiologis

Faktor ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup

² Kutznetzon, Ira and Milner, Helen V. *Political Science : The State of Dicipline*. W.W.Norton & Company, New York. 2002. Hlm. 568-575.

³ Ibid.

signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang, karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Jadi, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal sebagai keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang. karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Faktor sosiologis lain yang dipercaya penting mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau seorang calon pejabat adalah agama. Partai politik atau calon pejabat yang punya platform keagamaan yang sama dengan karakteristik keagamaan pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Orang yang taat beragama cenderung untuk mendukung partai yang ber-platform keagamaan dibanding yang berplatform sekular.

Oleh karena itu, memahami akar historis dan sosiologis dari partai politik dan calon-calon yang bersaing dalam pemilihan umum, akan membantu

mengklasifikasi kecenderungan keagamaan partai atau calon dan kemudian membantu mengungkapkan sejauh mana faktor agama signifikan dalam perilaku memilih.

I.5.2.2 Faktor Psikologis

Pendekatan ini dikembangkan oleh University of Michigan's Survey Centre. Pelopor utama pendekatan ini adalah August Cambell. Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atau ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan sebagainya. Apalagi pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada kategori psikologis.

Faktor ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai determinasi dalam menentukan perilaku memilih (politik) seseorang, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurut faktor psikologis ini dimana para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Sosialisasi politik yang diterima seseorang baik di lingkungan keluarga maupun pertemanan

sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik.

Menurut model ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political efficacy).⁴

Seseorang berpartisipasi dalam politik seperti memilih dalam pemilu bukan saja karena ia berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan tetapi juga karena ia ingin berpartisipasi. Seorang partisan punya energi psikologis untuk memilih partainya dalam pemilu, dan karena itu ia cenderung akan ikut serta dalam pemilu untuk memenangkan partainya. Dengan kata lain, seorang partisan berkemungkinan besar untuk berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan yang tidak. Orang yang berada dalam jaringan sosial tetapi bukan seorang partisan belum tentu ikut serta dalam pemilu. Pasalnya pemilu tidak secara langsung berguna bagi mereka yang tidak punya kaitan psikologis dengan partai tertentu.

Dalam faktor psikologis ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisipan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Partai politik seperti

⁴ Saiful Mujani. 2011. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Media Utama. Hal 22

halnya agama dan kelas sosial adalah sebuah entitas independen yang akan membentuk sentiment dan identitas politik seseorang yang tersosialisasi ke dalam partai politik tersebut. Identitas partai ini yang memperantarai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik, calon-calon pejabat publik, isu-isu politik terkait dan keputusan untuk memilih partai atau calon pejabat publik tertentu.

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dimana sebuah partai politik disikapi secara positif.

I.5.2.3 Faktor Rasional

Dua faktor terdahulu secara implicit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas keinginan dalang, mereka beranggapan bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya. Bahkan sebelum kampanye dimulai, ada faktor-faktor yang situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya

pasif tetapi juga aktif. Bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa merupakan isu-isu politik maupun kandidat yang dicalonkan. Penjelasan-penjelasan perilaku memilih tidaklah harus permanen seperti karakteristik sosiologis dan identifikasi partai tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa yang dramatik yang menyangkut persoalan-persoalan mendasar.

Faktor rasional memfokuskan perhatiannya pada pilihan yang dibuat orang ketika terlibat dalam perilaku politik. Asumsi dasar faktor tersebut adalah jika seseorang dihadapkan pilihan akan beberapa aksi alternatif, maka orang akan memilih aksi yang memaksimalkan kegunaan atau manfaat yang mereka harapkan.⁵ Menurut Menurut perspektif rasionalitas pemilih ini, seorang warga berperilaku rasional. Yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Jadi kalau seseorang warga ingin mendapatkan hasil yang sama dari pemilu, lepas dari ikut ataupun tidak. Maka warga tersebut seharusnya tidak ikut pemilu. Kalau bisa mendapatkan barang tanpa ongkos (waktu dan tenaga) mengapa harus mengeluarkan ongkos? Dengan kata lain, dalam perspektif pilihan rasional atau ekonomi-politik seorang warga tidak akan ikut pemilu karena tidak ikut pemilu akan lebih menguntungkan.

⁵ Santoso dalam Ambo Upe. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 108.

Model pilihan rasional, orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya : kehidupan ekonomi. Bagaimana seseorang pemilih mengetahui bahwa calon atau partai tertentu dapat membantu mencapai kepentingannya tersebut tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat dari seseorang pemilih atas posisi calon atau partai atas isu tersebut, atas kemampuan calon atau partai untuk memenuhi janji-janjinya.

I.5.2.4 Faktor Emosional

Dunia politik syarat akan dengan mobilisasi emosi masyarakat, pentingnya faktor ini disebabkan oleh dapat dipastikannya kenyataan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk berpikir dan menganalisis apa yang mereka butuhkan dan bagaimana memenuhinya. Masyarakat jenis ini adalah masyarakat yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi serta berpemahaman relatif rendah mengenai hak dan kewajiban politik mereka . kenyataannya bahwa masyarakat merasa senang dan nyaman terhadap figure pemimpin suatu partai.

I.5.3 Party Identification

Party Identification atau partisipanship didefinisikan sebagai orientasi afektif individual terhadap kelompok di lingkungan dimana dia berada. Party identification terbentuk dalam pemahaman sosiologis dan psikologis dimana individu mengidentifikasi dirinya melalui perasaan terikat kepada

kelompok-kelompok, dalam konteks disini adalah partai politik, maupun kelompok agama dan komunitas.⁶

Anthony Mughan dalam tesisnya yang berjudul *Depolarization, Party Attachments and Leader Effect* mengemukakan bahwa party identification dalam konseptualisasinya tidak lagi sebatas pengidentifikasian individu secara sosiologis dan psikologis terhadap satu partai politik (partisipanship exclusivism), tetapi pengidentifikasian diri tersebut bisa berwajah ganda, di satu sisi individu mengidentifikasikan diri terhadap satu partai politik, tetapi disisi lain individu juga mempunyai orientasi kuat terhadap partai lain. Mughan menjelaskan bahwa partisipanship exclusivism masih relevan ketika partisan kuat dan loyal terhadap partai politik, hal ini dibuktikan dengan pola suara yang tetap pada pemilihan umum. Dalam era demokrasi relevansi asumsi party identification dengan pola partisan exclusivism tersebut menjadi kurang relevan dikarenakan berubahnya pola pemilih partisan yang disebabkan oleh cairnya ideology partai-partai politik dan terjadinya depolarisasi sistem kepartaian.⁷

⁶ Mughan, Anthony, *Depolarization, Party Attachment and Leader Effect*, Ohio State University

⁷ Teori Dalton and Wattenberg 2002; Schmitt and Holmberg 1995; dan Thomassen 2005 dalam Mughan, Anthony, *Depolarization, Party Attachment and Leader Effect*, Ohio State University.

I.6 Kerangka Konsep Afiliasi Politik

I.6.1 Afiliasi Politik

Manusia adalah makhluk sosial, kebanyakan dari waktu ke waktu yang kita habiskan tentunya melibatkan orang lain dalam beberapa hal. Kecenderungan untuk berhubungan dengan jenisnya sendiri.

Afiliasi sebagai sebuah kata memiliki dua pengertian. Pertama penggabungan, perkaitan, kerja sama. Kedua penerimaan sebagai anggota (suatu golongan masyarakat atau perkumpulan). Sedangkan menurut Daryanto S.S kata afiliasi memiliki arti perhubungan, pertalian, gabungan dan kerja sama.

Arti afiliasi juga bisa dihubungkan dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk bergabung dengan atau sebagai anggota cabang organisasi partai politik untuk menghubungkan atau bekerja sama dengan parpol, dan untuk menelusuri asal usul individu dan hubungannya yang dijalin dengan sebuah parpol. Kelompok yang dimaksud disini adalah seperti partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Afiliasi seseorang dapat dilihat dari keikutsertaan atau keterlibatannya dalam partai politik, selain itu juga intensitas atau frekuensi dukungan yang diberikan padai partai atau kandidat tersebut.

Afiliasi politik mempunyai konotasi yang amat luas, yang mana salah satunya adalah arah orientasi politik pemilih sebagai wujud dari pengejawantahan hak pilih. Dalam hal ini ada yang memilih untuk menggunakan hak pilih dan ada

juga yang tidak. Oleh karena itu, afiliasi politik bisa mengarah pada pasangan kandidat tertentu atau bahkan tidak memilih/golput.

Alasan-alasan untuk berafiliasi (bergabung dengan orang lain) adalah

- Alasan utama kita untuk berafiliasi adalah untuk mendapatkan imbalan sosial (social rewards).
- Alasan lainnya mengapa seseorang melakukan afiliasi adalah untuk mengurangi rasa takut (kesengsaraan membutuhkan kawan)
- Untuk mendukung sesuatu hal yang kita percayai, kita membandingkan dengan orang lain agar mendapatkan validasi.

Operasionalisasi afiliasi politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana afiliasi politik perempuan marginal khususnya perempuan-perempuan marjinal kawasan Makam Rangkah di Surabaya dalam pemilihan legislatif 2014. Dalam hal ini ada perempuan-perempuan marjinal yang memilih untuk menggunakan hak pilih dan ada juga yang tidak. Oleh karena itu afiliasi politik bisa mengarah pada pasangan kandidat tertentu atau bahkan tidak memilih/golput.

I.6.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Huntington

mendefinisikan partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah.⁸

Miriam Budiardjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah⁹

Milbrath memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang.¹⁰ Alasan Pertama berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Kedua, menurut Milbrath, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin dan keyakinan/agama. Faktor-faktor itu yang merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam politik. Ketiga, menyangkut sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu hidup. Hal ini menyangkut sistem politik dan sistem kepartaian yang terdapat di lingkungan politiknya. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partai

⁸ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 6.

⁹ Ibid. Dalam, Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1994, hal 183.

¹⁰ Sudjiono Sastroadmojo. *OP.Cit.* Hal 92-94.

politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Untuk itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Dan keempat ialah berupa perbedaan regional, perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang ikut mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang.

Sementara itu Milbrath membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, yakni:¹¹ *Pertama*, kategori apatis yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spectator yang berupa orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. *Ketiga*, kategori gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Dan *keempat*, kategori pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Berbeda dengan Milbrath, Olsen memandang partisipasi politik menjadi enam lapisan. Adapun bagian-bagian itu adalah pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya pada orang lain). Warga negara marginal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

¹¹ *Ibid.* Hal 143.

I.6.3 Kaum marjinal

Kaum marjinal sama halnya masyarakat yang miskin, masyarakat pinggiran yang nantinya agar tidak tertinggal dan tidak terisolasi. Kaum miskin yang sudah terbiasa dengan kekerasan karena adanya kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang paling merasakan penderitaan atas himpitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka, bekal pendidikan yang pas-pasan membuat masyarakat marjinal susah berkompetisi di pasar tenaga kerja akibatnya peluang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka semakin sempit. Banyak yang menganggap kaum marjinal sebagai kaum pinggiran, keberadaan mereka dapat dikategorikan sebagai kaum buruh rendahan, kaum imigran kota (pemukiman kumuh dan padat), masyarakat di daerah perbatasan maupun masyarakat desa tertinggal karena faktor sumber daya alam yang tidak mendukung. Keberadaan mereka pelan tetapi pasti menjadi penyebab terjadinya akumulasi segala bentuk penyakit masyarakat seperti pelacuran, gelandangan / pengemis, anak jalanan, pencurian, perampokan, human trafficking, narapidana dan lain-lain di suatu negara.

I.7 Metode penelitian

I.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan penelitian mengenai afiliasi politik perempuan marginal terhadap pileg 2014 di Surabaya maka tipe penelitian yang

akan peneliti gunakan adalah tipe deskriptif kualitatif. Menurut Lisa Horison dimana pendekatan kualitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan.¹²

Beberapa pertimbangan pemilihan metode ini diantaranya adalah :

Pertama, karena permasalahan yang diteliti adalah tentang proses atau suatu fenomena, bukan hubungan antar variable. Maka disini yang akan dibahas adalah afiliasi politik perempuan marginal terhadap pemilihan umum legislatif 2014 di Surabaya.

Kedua, guna memperoleh gambaran secara mendalam fenomena atau permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara peneliti mendengar secara langsung narasumber berbicara mengenai afiliasi politik perempuan marginal terhadap pileg 2014 di Surabaya.

I.7.2 Jenis Data

I.7.2.1 Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara pewawancara dengan informan. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan seputar penelitian dan informan memberikan jawaban

¹² Horison, Lisa. 2007. *Metedeologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Perdana Group.

sesuai dengan penelitian. Pedoman wawancara dibedakan menjadi tiga tipe teoritis : standar, semistandar, yaitu pewawancara bisa meminta penjelasan dari jawaban yang telah diberikan oleh informan. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara juga digunakan pada penelitian ini. maksudnya adalah pewawancara terlebih dahulu menyiapkan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan pada proses wawancara. Hal ini dilakukan agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan informan penelitian antara lain purposive sampling technique dan Snow Ball technique. Purposive sampling technique adalah cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan. Snow Ball adalah cara penentuan informan dari satu informan ke informan lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap telah merepresentasikan berbagai informasi yang diperlukan.

I.7.2.2 Data Sekunder

Untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan data kepustakaan, media massa atau media online (internet), dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I.8 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ditunjukkan kepada perempuan-perempuan marginal (pemulung) di kawasan Makam Rangkah Surabaya. Pertimbangan saya memilih berfokus pada perempuan marginal (pemulung) tersebut adalah karena peneliti dapat secara langsung berwawancara kepada narasumber dan mendapatkan informasi secara tepat dan benar.

I.9 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah afiliasi politik perempuan marginal terhadap pileg 2014 di Surabaya yang terlibat langsung dalam penelitian ini adalah perempuan-perempuan marginal (pemulung). Karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif, diperlukan kriteria-kriteria umum yang dimiliki oleh informan, diantaranya adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai afiliasi politik perempuan marginal terhadap pileg 2014 di Surabaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini subjek penelitian merujuk pihak-pihak yang terlibat.

I.10 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, dengan tujuan agar diperoleh jawaban yang lebih luas, lebih rinci, lebih detail dan lebih mendalam. Di dalam melakukan proses wawancara peneliti dibantu dengan alat perekam dan buku catatan yang

bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable mengingat keterbatasan peneliti.

I.11 Tahap dan Prosedur Peneliti

Pertama, tahap pra lapangan, pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan penelitian, dilanjutkan dengan memilih lokasi penelitian, berikutnya adalah mengurus administrasi perizinan penelitian, seperti surat pengantar dan surat ijin dari institusi yang berwenang. Selanjutnya adalah langkah dalam memilih subjek penelitian.

Kedua, tahap pekerjaan lapangan, yang dilakukan setelah tahap pra lapangan yaitu informasi ringan atau sekilas tentang obyek penelitian telah didapatkan, misalnya : mengenal informan, mengetahui tempat tinggal informan dan sebagainya. Pada tahapan ini peneliti berusaha memahami latar penelitian atau terjun langsung ke lapangan penelitian sehingga peneliti lebih berperan serta dalam penggalan data.

Ketiga, tahap analisis data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan konsep dasar analisis data yang mempersoalkan analisis data.

I.12 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan saya terapkan dalam penelitian saya adalah :

Pertama, wawancara dengan pertanyaan mendalam (in depth interview) yang dilakukan kepada narasumber atau informan penelitian secara terstruktur.

Kedua, catatan lapangan (field notes) yaitu mencatat berbagai kejadian secara tertulis tentang apa saja yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti dari narasumber dalam rangka pengumpulan data.

Ketiga, penggunaan dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap bahan tertulis atau bentuk lain (data umum, data statistik, gambar, arsip, dan sebagainya baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi).

I.13 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya provinsi Jawa Timur tepatnya di Kawasan Makam Rangkah Surabaya dengan pertimbangan karena peneliti berfokus mengenai afiliasi politik perempuan marginal dalam pileg 2014 di wilayah Surabaya sehingga peneliti akan membutuhkan banyak data mengenai permasalahan tersebut di wilayah Surabaya dan akan lebih memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti bertempat tinggal di Surabaya sehingga peneliti dapat menghemat waktu, dana, dan tenaga. Ini merupakan salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di Surabaya.

I.14 Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan dikategorikan berdasarkan tema sesuai fokus penelitian, kemudian diinterpretasi dalam kerangka teoritik sesuai teoritik sesuai dengan pendekatan politik yang disajikan sesuai dengan permasalahan penelitian, dan disertai dengan data pendukungnya, yaitu hasil wawancara. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pencarian data adalah memindahkan hasil wawancara atau transkrip kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan data-data ataupun informasi-informasi yang telah di dapat kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga fenomena yang terjadi di lapangan penelitian digambarkan secara jelas.

I.15 Teknik Analisis Data

Setelah semua data mengenai afiliasi politik perempuan marginal terhadap pemilu legislatif Surabaya 2014 diperoleh di lapangan dan diolah, maka kemudian data-data tersebut dianalisis. Adapun data-data tersebut baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Teknik analisis data meliputi tiga tahapan atau proses, yaitu: *pertama*, reduksi data. Dalam proses reduksi data ini dilakukan proses living in dan living out, artinya data yang dinilai penting dimasukan, sementara yang dinilai tidak penting tidak dimasukkan atau tidak dipakai. Reduksi data ini tidak dilakukan pada akhir penelitian, akan tetapi dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Data yang berhasil

dihimpun dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan pribadi, catatan hasil observasi, serta catatan lapangan tentu tidak dipakai secara keseluruhan. Oleh karena itu, dilakukan reduksi data yang merupakan proses perampangan serta pemilihan data yang telah terkumpul, sehingga menjadi lebih sederhana. Data yang direduksi dipilih yang pokok dan relevan dengan fokus penelitian. *Kedua*, penyajian data adapun hal ini dimasukan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sederhana, selektif serta membantu memudahkan untuk memaknainya. Tahap penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi. Hal ini masih disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, yaitu berupa kata, kalimat dan paragraf. *Ketiga*, penarikan simpulan atau verifikasi. Format simpulan ini berisi atas jawaban terhadap problem penelitian, implikasi hasil penelitian baik secara teoritik maupun praktik, dan saran-saran yang bisa diajukan baik yang sesuai dengan bidang ilmu maupun saran praktis.¹³

¹³ Budi Prasetyo. Op Cit. hlm. 6-7.